

# REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023

## SUPM SORONG



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong Perubahan Kedua Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik. Renstra SUPM Sorong ini bertujuan sebagai gambaran untuk pelaksanaan kegiatan di SUPM Sorong di tahun 2023.

Peran SUPM Sorong sangat penting dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan seiring dengan perubahan dan dinamisasi pembangunan kelautan dan perikanan. Pencapaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaulat dan berkelanjutan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan merupakan upaya untuk mendukung tujuan utama pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan visi KKP untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

Renstra SUPM Sorong merupakan dokumen perencanaan yang memuat program penguatan daya saing SDM dalam kurun waktu 2020-2024, untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM KP melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan serta tata kelola pemerintahan yang baik.



Sorong, 27 Januari 2023  
Kepala SUPM Sorong

  
Erni Kristina P. A.Pi., M.P.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG**

Jalan Jenderal Ahmat Yani Nomor 32 Kelurahan Klakublik Sorong 98414 Telp.(0951) 321543/326626,  
Surat Elektronik : [supm.sorong@kkp.go.id](mailto:supm.sorong@kkp.go.id) Kotak Pos 109

Website <http://www.supmsorong@kkp.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) SORONG**  
**NOMOR : B. 99 /BRSDM-SUPM.SRG/TU.110/I/2023**  
**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH**  
**SORONG TAHUN 2023 SEBAGAI PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN**  
**KEPALA SEKOLAH SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG**  
**NOMOR : B. 888/ BRSDM-SUPM.SOR/RC.210/ IX / 2021 TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS SEKOLAH SEKOLAH**  
**USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) SORONG**  
**TAHUN 2020 - 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) SORONG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelarasan program Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan redesain system perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu mengatur kembali Rencana Strategis SUPM Sorong Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong Nomor B. 888/ BRSDM-SUPM.SOR/RC.210/IX/ 2021 Tahun 2020- 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
  5. Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  6. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 180/PER-BRSDM/2021 Tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2024 sebagai Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan nomor 12/PER- BRSDM/2020 Tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2021- 2024

7. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor : 260/PER-BRSDM.4/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor : 195/PER-BRSDM.4/2020 Tentang Rencana Strategis Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG TAHUN 2023 SEBAGAI PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) SORONG NOMOR : B.888/BRSDM-SUPM.SOR/RC.210/IX/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKOLAH SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) SORONG TAHUN 2020 – 2024

Pasal 1

Mengubah Lampiran I, II, dan III, dalam Pasal 4 Keputusan Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong Nomor : SK.1845/BRSDM-SUPM.SOR/RC.210/XII/2021 Tentang Rencana Strategis Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) SORONG Tahun 2020-2024, menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah ini.

Pasal 2

Keputusan Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah SORONG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong

pada tanggal : 16 Januari 2023

Kepala,



**ERNI KRISTINA P, A.Pi, M.P**  
NIP. 197410302001122002

---

Lampiran 1.

Rencana Strategis Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong Tahun 2023 Sebagai Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Sekolah Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong  
Nomor : B. 888/ BRSDM-SUPM.SOR/RC.210/IX/2021 Tentang Rencana Strategis Sekolah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Sorong Tahun 2020 - 2024

## **BAB I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis SUPM Sorong dilakukan sebagai tindak lanjut dari penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, Pasal 2a. yang menyebutkan bahwa Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan kelautan dan perikanan.

Renstra Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong merupakan penjabaran dari renstra Pusdik KP yang telah ditetapkan melalui peraturan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 195/PER-BRSDM.4/2020 tentang rencana Strategis Pendidikan kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 a sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pendidikan KP Tahun 2020-2024.

Renstra Pusdik KP menjelaskan Visi KKP yaitu “Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian gotong royong”. Keberadaan SUPM Sorong memiliki peran strategis dalam mendukung visi dan misi KKP tersebut. Dukungan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

- 
1. Pengembangan SDM yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital dengan mewujudkan lembaga pendidikan yang bertaraf internasional;
  2. Mencetak SDM unggul yang mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/ industri sehingga semua lulusan dapat berkarya baik bekerja di dunia usaha/industri atau menjadi wirausaha yang handal;
  3. Meningkatkan pendidikan SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi bagi anak pelaku usaha KP
  4. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar/ peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan
  5. Mewujudkan tata kelola SDM yang baik dan melakukan kerjasama dengan lembaga/ instansi dalam dan luar negeri.

Tugas SUPM Sorong selaras dengan rencana pengembangan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang, dimana Iptek sangat dibutuhkan masyarakat. Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human-centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber-physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan juga *network/komunikasi*, sedangkan *society* 5.0 merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber-physical-human systems*.

Tersedianya SDM KP yang kompeten memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pemenuhan atas hal tersebut semakin relevan maknanya ditengah derasnya arus globalisasi yang membuat persaingan semakin kompetitif.

Situasi ini memberikan peluang bagi SUPM Sorong untuk berimprovisasi dalam hal tersedianya SDM lulusan pendidikan KP yang kompeten bagi dunia usaha dan industri, terciptanya lapangan usaha baru melalui kewirausahaan.

---

## 1.2 KONDISI UMUM

Sekolah usaha Perikanan menengah Sorong merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan KP, Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekolah Usaha Perikanan Menengah, SUPM Sorong mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan menengah kejuruan dibidang perikanan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, SUPM Sorong telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dibidang pendidikan kelautan dan perikanan dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah lulusan SUPM Sorong yang terserap didunia kerja KP, pada Tahun 2015 sejumlah 107 orang dari jumlah lulusan 115 orang (95%), Tahun 2016 sejumlah 67 orang dari jumlah lulusan 113 orang (59%), Tahun 2017 sejumlah 78 orang dari jumlah lulusan 117 orang (67%), Tahun 2018 sejumlah 81 orang dari jumlah lulusan 117

---

orang ( 65%) dan Tahun 2019 sejumlah 100 orang dari total jumlah lulusan 149 orang (67%).

2. Jumlah peserta didik SUPM Sorong pada Tahun 2015 sejumlah 501 orang, Tahun 2016 turun menjadi 430 orang, meningkat pada Tahun 2017 dan 2018 menjadi 501 orang, dan pada Tahun 2019 turun menjadi 495 orang.
3. Jumlah lulusan SUPM Sorong yang bersertifikat kompetensi mengalami trend positif dimana pada Tahun 2015 dan 2016 sejumlah 113 orang, pada Tahun 2017 meningkat menjadi 117 orang, tahun 2018 sejumlah 124 orang dan tahun 2019 sejumlah 149 orang.
4. Persentase anak pelaku utama yang diterima menjadi peserta didik SUPM Sorong mengalami trend positif dari Tahun 2015 sejumlah 40%, Tahun 2016 sejumlah 44%, Tahun 2017 sejumlah 49,25%, tahun 2018 sejumlah 48, 11% dan tahun 2019 sejumlah 50%.
5. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya pada tahun 2015 dan 2016 sejumlah 6 orang, sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan 2019 sejumlah 7 orang.

### **1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN**

#### **A. POTENSI**

Sumberdaya perikanan di Indonesia sangat potensial terutama di wilayah kawasan Indonesia bagian timur, potensi ini membutuhkan sumberdaya manusia yang kompeten untuk mengelola sumberdaya. Namun mengingat masih minimnya lembaga pendidikan perikanan di Indonesia timur, sehingga kebutuhan SDM perikanan yang handal dan kompeten sangat dibutuhkan oleh dunia usaha/dunia industri. Keberadaan SDM dan Iptek memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dapat dicapai melalui kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendukung peran strategis tersebut, SUPM Sorong memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari 28 orang

---

tenaga fungsional dan tenaga kependidikan sebanyak 27 orang. Dalam penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh SUPM Sorong dilakukan dengan sistem pembelajaran dengan pendekatan Teaching Factory 70% praktek dan 30% teori. Sampai dengan Tahun 2020, SUPM Sorong menerima peserta didik dari anak pelaku utama perikanan sejumlah 50% dari total penerimaan peserta didik.

Dalam penyelenggaraan pendidikan SUPM Sorong memiliki 3 (tiga) program keahlian serta membekali lulusan dengan sertifikat keahlian yang sesuai yakni :

1. Program Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI) dibekali dengan sertifikat keahlian ANKAPIN-II yang proses penyelenggaraannya bekerjasama dengan DPKP/PUKP-KAPIN Wilayah VIII Papua, Sertifikat Basic safety training Fisheries (BST-F), Buku Pelaut dan Sertifikat Kompetensi Bidang Penangkap Ikan dari LSP SUPM Sorong
2. Program Keahlian Teknik Kapal Penangkap Ikan (TKPI) yang dibekali dengan sertifikat keahlian ATKAPIN-II juga bekerjasama dengan DPKP/PUKP-KAPIN Wilayah VIII Papua, Sertifikat Basic safety training Fisheries (BST-F), Buku Pelaut dan Sertifikat Kompetensi Bidang Teknik Kapal Penangkap Ikan dari LSP SUPM Sorong
3. Program Keahlian Agribisnis Perikanan Air Payau dan Air laut (APAPL) yang dibekali dengan sertifikat keahlian Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), yang proses penyelenggaraannya bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Juga dilengkapi dengan sertifikat kompetensi dari LSP SUPM Sorong
4. Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHP) yang dibekali dengan sertifikat keahlian Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) yang proses penyelenggaraannya bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Juga dilengkapi dengan sertifikat kompetensi dari LSP SUPM Sorong.

Selain itu SUPM Sorong juga telah ditunjuk sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) serta sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak I (LSP-P1) untuk melakukan uji kompetensi keahlian serta menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta didik SUPM Sorong, SMK KP ataupun masyarakat.

---

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah yaitu terkait dengan penataan kelembagaan pendidikan di Indonesia, maka dimulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 SUPM Sorong dipersiapkan menjadi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Papua dengan ibukota Jayapura, Papua Barat ibukota Manokwari, Papua Selatan ibukota Merauke, Papua Tengah ibukota Nabire, Papua Pegunungan ibukota Jaya Wijaya dan yang baru saja terbentuk yaitu Papua Barat Daya ibukota Sorong. Papua yang dalam kurun waktu terakhir mengalami pemekaran menjadi 6 (enam) propinsi/daerah otonomi baru tentunya membutuhkan lembaga pelatihan KP untuk meningkatkan kompetensi masyarakatnya. Sehingga dengan hal tersebut, transformasi kelembagaan SUPM Sorong sebagai salah satu satuan kerja KKP yang dapat berperan aktif dalam pelatihan perikanan di wilayah kerjanya sangat dibutuhkan.

## B. PERMASALAHAN

Masalah dan tantangan yang dihadapi SUPM Sorong saat ini dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagai satuan pendidikan KP secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Belum terbangunnya sinergi hulu maupun hilir pemanfaatan hasil SDM oleh unit teknis KKP dalam merealisasikan program prioritas KKP khususnya program prioritas yang ditetapkan sebagai *Quick Win* pembangunan sektor KP;
2. Belum optimalnya *link and match* instansi pemerintah, lembaga pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat/ LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha/ industri dalam meningkatkan kapasitas SDM KP yang dapat membuka peluang pemanfaatan bersama aset/sumberdaya (*resource sharing*) dan serapan lulusan.
3. Sarana dan prasarana pendidikan SUPM Sorong belum memenuhi standar kebutuhan dunia usaha/ dunia industri. Luas Kampus SUPM Sorong yang sangat minim juga memerlukan perluasan untuk dapat memaksimalkan fungsi SUPM Sorong sebagai lembaga pendidikan maupun pelatihan perikanan.
4. Kualitas dan kuantitas SDM SUPM Sorong khususnya tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang masih terbatas seiring transformasi

---

kelembagaan SUPM Sorong yang akan berubah menjadi Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BP3).

5. Wilayah geografis Papua yang masih mengalami kendala transportasi, iklim, jaringan maupun faktor keamanan di beberapa daerah yang masih sering mengalami konflik menyebabkan peserta didik SUPM Sorong banyak yang terkendala mendapatkan akses pendidikan.

### C. LINGKUNGAN STRATEGIS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, SUPM Sorong memiliki tugas untuk menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan dibidang perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menjalankan mandat tersebut, SUPM Sorong menyusun rencana strategis dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi capaian kinerjanya.

Lingkungan strategis secara teoritis dapat diartikan sebagai situasi kinerja baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan SUPM Sorong yang telah ditetapkan untuk Tahun 2020-2024. Faktor strategis tersebut adalah faktor-faktor strategis yang bersumber dari internal (*Internal Factor Strategic*) maupun eksternal (*External Factor Strategic*) baik yang bersifat statis maupun dinamis yang tercakup dalam perspektif wilayah ditingkat global, regional, nasional maupun sektoral. Berikut diuraikan situasi internal maupun eksternal dalam lingkungan strategis yang dihadapi SUPM Sorong yaitu:

#### **1. Faktor Strategis Lingkungan Eksternal di Tingkat Global**

Tuntutan era globalisasi Dunia menjadi sangat terbuka, sehingga perlu diamati dengan seksama bahwa setiap perubahan yang terjadi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan nasional, termasuk yang terjadi di sektor kelautan dan perikanan. Era Globalisasi mengharuskan dunia perikanan Indonesia membuka diri terhadap negara lain sehingga kerja sama antar negara dalam berbagai hal menjadi sesuatu kebutuhan, termasuk kerja sama dalam riset dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di sektor kelautan dan perikanan diantaranya;

- 
- a. Adanya persyaratan kompetensi untuk memastikan tenaga kerja memiliki kemampuan sehingga mampu bersaing sesuai *guidelines for development of Regional Model Competency Standards (RMCS) ILO*;
  - b. Adanya pemenuhan persyaratan tentang kapasitas kelembagaan dan SDM bidang penangkapan ikan yang mengatur standar pelatihan, sertifikasi dan tugas jaga awak kapal sesuai dengan konvensi yang dikeluarkan oleh IMO (*STCW-F 1995*);
  - c. Perkembangan era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 telah memicu digitalisasi dan otomatisasi di berbagai sektor dalam proses industri serta menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik;
  - d. Kompetensi pada bidang teknologi informasi yang harus dimiliki SDM KP untuk menghadapi persaingan di era globalisasi dan ekonomi digital. Indonesia dituntut harus mampu memanfaatkannya demi menjamin keberlangsungan kepentingan nasional di bidang perhubungan perikanan, melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan Kelautan dan Perikanan.

## **2. Faktor Strategis Lingkungan Eksternal di Tingkat Regional**

Dinamika perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang terjadi di dunia mempengaruhi kondisi lingkungan strategis di tingkat regional di beberapa negara termasuk Indonesia, diantaranya;

- a. Implementasi kerjasama ekonomi dan perdagangan yang bersifat regional (APEC, MEA, dan WTO) maupun antar negara yang bersifat bilateral, memerlukan penyiapan SDM yang unggul;
- b. Penetapan standar kompetensi tenaga kerja sesuai dengan *ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification System*;
- c. Pertumbuhan penduduk sebagai modal SDM dan potensi meningkatkan konsumsi ikan;
- d. Isu lingkungan (sampah plastik di laut, karbon biru dan kesehatan laut) serta pengelolaan perikanan (IUUF) dalam wilayah regional membutuhkan rekomendasi kebijakan Pusdik KP.

---

### 3. Faktor Strategis Lingkungan Internal di Tingkat Nasional

Faktor strategis lingkungan internal di tingkat nasional dapat dilihat dari perspektif ketahanan nasional yang lebih difokuskan pada aspek: (a) Konektivitas antar Pulau; (b) Sumber Daya KP; dan (c) Tingkat Pendidikan yang masih rendah, dengan uraian tiap aspek sebagai berikut:

a. Konektivitas antar pulau

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan diperlukan suatu kondisi yang membuat ikatan hubungan atau konektivitas antar pulau yang baik dan Kondisi geografis ini memerlukan suatu upaya untuk menjaga dan menyatukan wilayah nusantara dari seluruh komponen masyarakat untuk menjadikannya sebagai suatu kekuatan (*strength*), namun tetap menjaga dan mengatasinya sebagai suatu kelemahan (*weakness*), khususnya melalui pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

b. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Indonesia memiliki Potensi sumber daya KP yang melimpah dimanfaatkan secara optimal karena 90% pemanfaat didominasi skala kecil baik di laut maupun perairan umum daratan;

c. Tingkat Pendidikan dan kompetensi masyarakat KP masih rendah.

Tingkat pendidikan dan kompetensi masyarakat KP masih rendah. Gerakan ekonomi kerakyatan yang menghasilkan produk perikanan primer yang memiliki nilai tambah rendah masih mendominasi struktur perekonomian sektor KP.

#### D. ISU-ISU STRATEGIS

SUPM Sorong memiliki peran untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM melalui Pendidikan KP. Dalam merespon sejumlah isu yang berkembang, keberadaan SUPM Sorong berperan sangat penting. Beberapa isu strategis yang memerlukan kontribusi dari SUPM Sorong, yaitu:

1. Minimnya SDM kelautan dan perikanan yang terampil di wilayah kerja SUPM Sorong

- 
2. Tingginya jumlah anak pelaku utama perikanan di wilayah kerja SUPM Sorong
  3. Tata kelola sumberdaya perikanan berkelanjutan

Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya kelautan yang berorientasi pada; (a) optimalisasi pendayagunaan pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar, (b) efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, (c) penanggulangan IUU fishing dan kegiatan yang merusak, (d) kerentanan ekosistem, (e) penyerasian tata kelola laut, (f) optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan, dan (g) peningkatan peran masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Pendidikan kelautan dan perikanan tidak hanya diarahkan untuk teknis budidaya, penangkapan, maupun pengolahan namun juga pengelolaan sumber daya KP yang berkelanjutan.
  5. Pengembangan sumberdaya kelautan.

Pengembangan teknologi dan inovasi sistem akuakultur, penangkapan, pengolahan produk dan peningkatan nilai tambah, keamanan pangan, serta pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis bioteknologi. Pengembangan teknologi kelautan yang mencakup eksplorasi, eksploitasi, Konservasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim
  6. Peningkatan investasi, ekspor dan industrialisasi perikanan.

Perbaikan standar mutu produk, manajemen dan pengelolaan sumberdaya serta daya saing produk perikanan untuk menghadapi globalisasi perdagangan.
  7. Daya Saing SDM, inovasi teknologi dan riset.

Mendukung pengembangan peningkatan kapasitas SDM, dilakukan melalui pengembangan *networking*, berupa penciptaan dan penguatan jaringan antar pusat-daerah, lintas sektor, dan kerjasama internasional dilakukan untuk mengidentifikasi dan penyelesaian permasalahan yang sangat beragam. Komunikasi dan saling memberdayakan antar anggota jaringan diperlukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Pengembangan energi terbarukan sebagai bagian untuk mencapai sasaran kebijakan Energi Nasional tahun 2025 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006) yaitu peran energi baru dan terbarukan lainnya, termasuk biomasa menjadi lebih dari 5%. Pemanfaatan mikro alga, rumput laut, arus dan ombak laut untuk energi terbarukan menjadi tantangan riset kelautan dan perikanan

---

kedepan. Pengembangan Teknologi penghasil energy alternative dan bioenergy untuk industri kelautan dan perikanan yang diperlukan untuk efisiensi usaha.

8. Kesejahteraan masyarakat KP.

Perbaiki standar mutu produk, manajemen dan pengelolaan sumberdaya serta daya saing produk perikanan untuk menghadapi globalisasi perdagangan dan Peningkatan konsumsi ikan per kapita dan penyediaan lapangan kerja sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan, maka revitalisasi perikanan perlu diprioritaskan pada peningkatan produksi perikanan.

---

## **BAB II.**

### **VISI DAN MISI**

#### **A. VISI**

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Untuk visi kementerian Kelautan dan perikanan pada tahun 2020-2024 menggunakan visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”. Visi ini diartikan dimana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang diwujudkan dengan gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Visi KKP tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Visi BRSDM pada Tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Visi Pusat pendidikan KP pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung visi BRSDM yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Visi SUPM Sorong pada Tahun 2020-2024 mendukung Visi Pusat pendidikan kelautan dan Perikanan yakni “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui kegiatan pendidikan menengah bidang kelautan dan perikanan”.

---

## **B. MISI**

Misi SUPM Sorong yang mengacu pada Misi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dan BRSDM yang mengacu pada misi KKP yakni:

1. Peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan melalui penyelenggaraan pendidikan menengah bidang kelautan dan perikanan berbasis kerjasama industri
2. Membangun sistem pendidikan KP berbasis digital/ teknologi informasi
3. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan organisasi
4. Peningkatan jaminan mutu kelembagaan pendidikan KP melalui pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

## **C. TUJUAN**

Tujuan yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi SUPM Sorong dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2021-2024 adalah:

1. Menghasilkan SDM berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan
2. Memperluas akses pendidikan dengan berbasis digital/ teknologi (*e-learning*) bagi anak pelaku utama pada satuan pendidikan kelautan dan perikanan di SUPM Sorong.
3. Menjadikan SUPM Sorong sebagai pusat rujukan (*centre of excellent*) oleh satuan pendidikan yang ada diwilayah kerjanya
4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial SDM secara efektif dan efisien
5. Mewujudkan ASN yang profesional dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani melalui peningkatan kompetensi aparatur dilingkungan SUPM Sorong
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan di SUPM Sorong dalam rangka mendukung kinerja reformasi birokrasi KKP.

---

## SASARAN STRATEGIS SUPM SORONG 2020-2024

Sasaran kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh SUPM Sorong sebagai suatu *outcome/ impact* dari berbagai program yang dilaksanakan. Sasaran Program SUPM Sorong adalah sebagai berikut;

- SS 1 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat
- SS 2 Tata kelola pemerintahan yang baik

Dengan memperhatikan sasaran strategis BRSDM dimaksud, maka sasaran strategis yang akan dicapai oleh Pusat Pendidikan KP pada Tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis BRSDM yakni sebagai berikut:

- SS 1 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat melalui kegiatan pendidikan KP
- SS 2 Tata kelola yang baik pada Pusat Pendidikan KP

Sasaran strategis Pusat Pendidikan KP tersebut dijabarkan dalam sasaran kegiatan SUPM Sorong yakni :

1. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat melalui kegiatan pendidikan KP
2. Terselenggaranya pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten
3. Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan SUPM Sorong

Sasaran kegiatan ini kemudian dijabarkan lebih spesifik dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Sasaran Kinerja I (SS1) Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat melalui kegiatan pendidikan KP dijabarkan dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Lulusan satuan pendidikan KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%), dimana target indikator kinerja ditetapkan sebesar 75% pada tahun 2020-2024
2. Lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (orang), dimana ditetapkan target indikator kinerja ditetapkan sebesar 5% dari jumlah lulusan yaitu sejumlah 17 orang pada tahun 2020, 17 orang pada tahun 2021, 7 orang pada Tahun 2022 dan sejumlah 7 orang pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024 tidak ditargetkan,

---

dikarenakan SUPM Sorong pada Tahun 2024 direncanakan sudah mengalami transformasi kelembagaan menjadi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

Untuk menjabarkan misi pada sasaran strategis 2 (SS2) Terselenggaranya pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten maka dijabarkan dalam indicator kinerja sebagai berikut :

1. Lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi (Orang). Target kinerja untuk indikator kinerja ini ditetapkan sebesar 148 orang pada tahun 2020, 175 orang pada tahun 2021, 120 orang pada tahun 2022 dan 125 orang pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024 sudah tidak terdapat peserta didik SUPM Sorong, sehingga pada tahun 2024 tidak ditargetkan jumlah lulusannya.
2. Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang). Tahun 2020 ditargetkan jumlah peserta didik SUPM Sorong sejumlah 451 orang, di tahun 2021 sejumlah 283 orang dan pada tahun 2022 sejumlah 125 orang.
3. Pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya (Orang). Target kinerja yang ditetapkan adalah sejumlah 7 orang pada tahun 2020-2024.

Untuk menjabarkan Sasaran strategis 3 (SS3) Tata kelola pemerintahan yang baik dilindungi SUPM Sorong maka dirincikan dalam indicator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK SUPM Sorong ditargetkan sebesar 100% ditahun 2020-2024
2. Indeks Profesionalitas ASN SUPM Sorong (indeks) ditetapkan target sebesar 73 indeks pada tahun 2020-2024
3. Nilai Rekonsiliasi Kinerja SUPM Sorong ditetapkan sebesar 80 pada tahun 2020-2021, dan meningkat menjadi 92 pada tahun 2022-2024
4. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) ditetapkan target sebesar 84% pada tahun 2020 sd 2021, 86 pada tahun 2022 sd 2024
5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Sorong (%), ditetapkan target sejumlah 65% pada tahun 2020-2021, dan meningkat menjadi 70% pada tahun 2022 sd 2024

- 
6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) SUPM Sorong ditetapkan sebesar 89 pada tahun 2020-2024
  7. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SUPM Sorong, ditetapkan sebesar 86 di tahun 2020 sd 2021 serta meningkat menjadi 89 ditahun 2022-2024
  8. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal SUPM Sorong (%) ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2020-2024.

---

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI**  
**DAN KERANGKA PENDANAAN**

**3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PUSAT PENDIDIKAN KP**

Arah kebijakan Pusat Pendidikan KP 2020-2024 mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional (RPJMN) dan arah kebijakan pembangunan KP dan BRSDMKP 2020 - 2024 yang ada. Strategi penguatan daya saing SDM merupakan prioritas utama Pusdik KP yang diarahkan untuk menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing yang mendukung pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan dan program, serta melaksanakan penyusunan pedoman, standar, bimbingan, monitoring, dan evaluasi tata penyelenggaraan, kebutuhan pendidikan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan pendidikan, dan kelembagaan tenaga pendidik di bidang kelautan dan perikanan. Arah kebijakan pendidikan KP yang dilaksanakan diantaranya adalah:

- 1) Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada putra/putri pelaku utama kelautan dan perikanan untuk memperoleh pendidikan di satuan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 2) Peningkatan kualitas pembelajaran dengan pendekatan Teaching Factory dibidang kelautan dan perikanan;
- 3) Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi peserta didik;
- 4) Pengembangan minat kewirausahaan bagi peserta didik Kelautan dan Perikanan;
- 5) Meningkatkan kerjasama pendidikan dengan lembaga lain.
- 6) Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan KP.

Arah kebijakan nasional yang terkait dengan kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Pusdik KP, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, antara lain dengan:
  - a. pengembangan pendidikan vokasi yang mendukung pembangunan prioritas nasional yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan dunia usaha

- 
- dan pariwisata, kemaritiman, pengembangan wilayah terutama daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat;
- b. pengembangan model pendidikan vokasi yang didorong oleh kerja sama dengan dunia usaha/industri;
  - c. pengembangan program studi/program keahlian/paket keahlian pendidikan vokasi berbasis kepada proyeksi kebutuhan lulusan pendidikan vokasi;
  - d. penyelesaian penyusunan kurikulum paket keahlian pendidikan vokasi berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia);
  - e. peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan dan kompetensi lulusan pendidikan vokasi;
  - f. peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
  - g. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan vokasi; dan;
  - h. pemenuhan ketersediaan, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik vokasi,
  - i. perluasan akses pendidikan kepada pelaku utama
  - j. sertifikasi Kompetensi sesuai kebutuhan dan berkarakter (30% teori & 70% praktek)
  - k. wirausaha dan Tenaga Kerja Profesional
  - l. menjadikan satuan pendidikan KP Pusat Rujukan (*Center of Excellence*) pendidikan vokasi kelautan dan perikanan
- 2) Meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pusat pengembangan inovasi dalam mendorong pembangunan;
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan budi pekerti.

### 3.2 STRATEGI PUSAT PENDIDIKAN KP

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai Pusdik KP pada tahun 2020-2024, maka strategi yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

#### **B.1. Sasaran Strategis 1 : Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat melalui kegiatan pendidikan KP**

**Strategi 1: Membangun sistem penyelenggaraan pendidikan berbasis kerjasama industri**

Langkah operasional:

- 
- a. Menghasilkan lulusan pendidikan yang membentuk startup/wirausaha baru dan tenaga kerja profesional.
  - b. Mengembangkan kurikulum vokasi dengan pendekatan "*Teaching Factory*" dan memperkuat *link and match* berbasis kerjasama dengan Industri,
  - c. Memperkuat Pendidika Tinggi Berkualitas (Pembangunan kampus pendidikan dan riset)
  - d. Memperkuat karakter tangguh dan mandiri dalam membangun pola pembelajaran kewirausahaan.
  - e. Mengembangkan modul, kurikulum pendidikan berbasis SKKNI dan kebutuhan organisasi
  - f. Mengembangkan sertifikasi kompetensi KP sesuai kebutuhan DUDI bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi
  - g. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik sesuai bidang keahlian/keilmuan yang dibutuhkan.
  - h. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan dan sesuai kebutuhan kurikulum.
  - i. Penumbuhan budaya maritim.

### **Strategi 2: Membangun sistem pendidikan ASN KKP sesuai kebutuhan organisasi**

Berkaitan dengan agenda peningkatan kapasitas aparatur sebagai motivator dan dinamisator pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, Pusdik KP mempunyai 2 (dua) sasaran pokok dengan arah kebijakan sebagai berikut:

**Sasaran Pertama:** Pemenuhan kompetensi administrasi, untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada pemenuhan kompetensi bidang administrasi, antara lain:

- a. Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen perkantoran;
- b. Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen keuangan;
- c. Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen SDM;
- d. Pengembangan kompetensi dalam bidang sistem manajemen mutu;
- e. Pengembangan kompetensi dalam bidang sistem manajemen lingkungan;
- f. Penumbuhan jiwa kewirausahaan instansi pemerintah; dan

- 
- g. Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen public teknis substansi.

**Sasaran Kedua** : Pemenuhan kompetensi teknis substansi, untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada pemenuhan kompetensi, antara lain:

- a. Pengembangan kompetensi bidang penangkapan ikan;
- b. Pengembangan kompetensi bidang pembudidayaan ikan;
- c. Pengembangan kompetensi bidang pengolahan ikan;
- d. Pengembangan kompetensi bidang konservasi sumberdaya Ikan;
- e. Pengembangan kompetensi bidang ekowisata bahari;
- f. Pengembangan kompetensi bidang pengawasan perikanan;
- g. Pengembangan kompetensi bidang pemberdayaan masyarakat;
- h. Pengembangan kompetensi bidang permesinan perikanan;
- i. Pengembangan kompetensi bidang agribisnis perikanan.

### **Strategi 3: Membangun sistem pendidikan KP berbasis digital Teknologi Informasi**

Langkah Operasional:

- a. Mengembangkan sistem pendidikan KP sesuai kebutuhan pelaku utama, dengan metode pembelajaran jarak jauh e-learning dan online training.
- b. Menyusun NSPK pendidikan KP berbasis digital.
- c. Menyusun modul, kurikulum, dan materi pendidikan KP digital.
- d. Menyiapkan SDM dengan keterampilan teknologi informasi.
- e. Menyiapkan perangkat/sarana untuk pendidikan, berbasis digital (*e-learning*).

Pengertian Pendidikan Jarak Jauh yaitu :

- a) Proses pendidikan yang terorganisasi yang menjembatani keterpisahan antara siswa dengan pendidik dan dimediasi oleh pemanfaatan teknologi, dan pertemuan tatap muka yang minimal.
- b) Pendidikan jarak jauh ditawarkan lintas ruang dan waktu sehingga siswa memperoleh fleksibilitas belajar dalam waktu dan

---

tempat yang berbeda, serta menggunakan beragam sumber belajar.

c) Biasanya berbentuk pendidikan masif

**Seusai dengan UU No.12 tentang Pendidikan Tinggi pasal 31**

Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.

Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan
- b. memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan pembelajaran.

Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional pendidikan Tinggi.

Penentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Proses Pembelajaran :

- a. Memiliki rancangan belajar yang jelas dan dipatuhi pelaksanaannya: belajar mandiri, belajar terbimbing, belajar di kampus/USBJJ, residensial, terstruktur, menggunakan beragam sumber belajar
- b. memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada pada satu tempat yang sama dengan peserta didik;
- c. menggunakan modus pembelajaran yang peserta didik dengan pendidiknya terpisah;
- d. menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
- e. menekankan interaksi pembelajaran berbasis TIK, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas;

- 
- f. menggunakan bahan ajar dalam bentuk *e-learning* dan kombinasinya dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media dan dari beragam sumber;
  - g. Sumber belajar tersebut merupakan bahan ajar dan berbagai informasi yang dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk berbasis TIK, yang digunakan dalam proses pembelajaran;
  - h. Memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat.

## **B.2. Sasaran Strategis 2 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Pusat Pendidikan KP**

Langkah Operasional:

1. Memperkuat tata kelola dan kerjasama pengembangan SDM yang dilandasi prinsip-prinsip konsultatif, komprehensif, fleksibel, transparan,
2. Meningkatkan pranata dan kelembagaan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima melalui pembinaan dan pendampingan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan SAKIP, dan menuju satker berstatus WBK/WBBM.
3. Pengelolaan perencanaan dan anggaran pembangunan secara akuntabel.
4. Pengelolaan keuangan sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

## **B.3. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya birokrasi Pusat Pendidikan KP yang efektif, Efisien dan berorientasi pada layanan prima.**

Langkah Operasional:

Memperkuat pengawasan terhadap UPT Lingkup Pusat Pendidikan KP dilandasi prinsip-prinsip Efektif, Efisien dan berorientasi pada layanan prima.

---

### 3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SUPM SORONG

Pembangunan pendidikan berperan penting dalam menghasilkan SDM berkualitas, berkompetensi dan berdaya saing. Pembangunan pendidikan ini diselenggarakan untuk menjamin ketersediaan akses pendidikan yang merata dan mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri serta berdaya saing. Pemenuhan akses layanan pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan cakupan penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki keahlian yang sesuai dan dapat mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sementara disisi lain, belum optimalnya layanan pendidikan dalam menghasilkan lulusan berkompeten yang dapat terserap di dunia usaha/ dunia industri merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pembangunan pendidikan. Peran pendidikan merupakan suatu hal penting dalam mendorong mengentaskan kemiskinan, dapat membantu mengatasi berbagai masalah social ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/ dunia industry.

Arah kebijakan SUPM Sorong Tahun 2020-2024 mengacu pada arah kebijakan Pusat Pendidikan KP yang mendukung arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional (RPJM) dan arah kebijakan pembangunan KP dan BRSDM KP Tahun 2020-2024. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing sehingga dapat mendukung pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

SUPM Sorong memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan menengah kejuruan dibidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan fungsi penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana program dan anggaran serta pelaporan kegiatan; pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa dibidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan: pelaksanaan kegiatan kokurikuler; pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa; pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan; pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industry, orang tua siswa dan masyarakat;

---

pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga perlengkapan. Arah kebijakan SUPM Sorong yang dilaksanakan diantaranya yakni:

1. Pemberian kesempatan kepada anak pelaku utama kelautan dan perikanan untuk memperoleh pendidikan di SUPM Sorong
2. Penyelenggaraan pendidikan vokasi dibidang kelautan dan perikanan melalui pendekatan *Teaching Factory*
3. Penyelenggaraan sistem sertifikasi kompetensi peserta didik
4. Pengembangan minat wirausaha bagi peserta didik SUPM Sorong
5. Meningkatkan kerjasama pendidikan dengan lembaga lain
6. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan KP

Arah kebijakan Pusat Pendidikan KP yang terkait penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan di SUPM Sorong adalah :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, antaranya dengan:
  - a. Pengembangan pendidikan vokasi yang mendukung pembangunan prioritas nasional yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, kemaritiman, pengembangan wilayah terutama daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat;
  - b. Pengembangan model pendidikan vokasi yang didorong oleh kerjasama dengan dunia usaha/ dunia inudtri
  - c. Pengembangan program studi/ program keahlian/ paket keahlian pendidikan vokasi berbasis kepada proyeksi kebutuhan lulusan pendidikan vokasi
  - d. Peningkatan penilaian kualitas SUPM Sorong dan kompetensi lulusan pendidikan vokasi
  - e. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
  - f. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan vokasi
  - g. Pemenuhan ketersediaan, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik vokasi
  - h. Perluasan akses pendidikan kepada anak pelaku utama
  - i. Sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dan berkarakter (30% teori dan 70% praktek)
  - j. Wirausaha dan tenaga kerja profesional
  - k. Menjadikan SUPM Sorong sebagai pusat rujukan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan diwilayah kerjanya

- 
2. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan budi pekerti. Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, strategi yang dilaksanakan SUPM Sorong adalah sebagai berikut:
    - a. Menghasilkan lulusan pendidikan yang membentuk start up/ wirausaha baru dan tenaga kerja profesional
    - b. Memperkuat karakter tangguh dan mandiri dalam membangun pola pembelajaran kewirausahaan
    - c. Mengembangkan modul, kurikulum pendidikan berbasis SKKNI dan kebutuhan organisasi
    - d. Mengembangkan sertifikasi kompetensi KP sesuai kebutuhan dudi dengan memperkuat LSP SUPM Sorong
    - e. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik sesuai bidang keahlian/ keilmuan yang dibutuhkan
    - f. Meningkatkan kapasitas sarana/ prasarana pendidikan dan sesuai kebutuhan kurikulum
    - g. Penumbuhan budaya maritim
    - h. Membangun sistem pendidikan di SUPM Sorong dengan berbasis digital/ teknologi informasi
  3. Tata kelola pemerintahan yang baik
    - a. Memperkuat tata kelola dan kerjasama pengembangan SDM yang dilandasi prinsip-prinsip konsultatif, komprehensif, fleksibel dan transparan
    - b. Meningkatkan pranata dan kelembagaan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima melalui pembinaan dan pendampingan reformasi birokrasi, pelaksanaan SAKIP dan menuju satker berstatus WBBM
    - c. Pengelolaan perencanaan dan anggaran pembangunan secara akuntabel
    - d. Pengelolaan keuangan sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Selain arah dan kebijakan Pusat Pendidikan KP Tahun 2021-2024, langkah KKP dalam memenuhi amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah yaitu terkait dengan penataan kelembagaan pendidikan. Dimana kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah menjadi kewenangan daerah, Sehingga, sejak Tahun 2019 proses penataan kelembagaan Sekolah Usaha Perikanan Menengah sudah dimulai. Penataan kelembagaan SUPM dilaksanakan dengan 3 model yaitu : 1) Peningkatan kelembagaan SUPM

---

menjadi Politeknik KP (SUPM Ladong, pariaman, Kotaagung, Tegal, Maluku); 2) Penggabungan SUPM dengan Politeknik KP (SUPM Kupang dan Bone); 3) Perubahan kelembagaan SUPM menjadi BP3 (SUPM Pontianak dan SUPM Sorong). Kebijakan ini diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut:

- a. Melaksanakan restrukturisasi organisasi dalam penataan sistem manajemen
- b. Menyusun prosedur dan tata kerja baru sesuai dengan pembaruan yang ditetapkan
- c. Mengembangkan sistem manajemen keuangan
- d. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan penjaminan mutu

### **3.4 KEGIATAN PRIORITAS SUPM SORONG**

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan KP, kegiatan prioritas SUPM Sorong pada Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang terdiri dari :
  - a. Penerimaan peserta didik baru dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada anak pelaku utama kelautan dan perikanan
  - b. Pengajaran dan perkuliahan dengan pendekatan *Teaching Factory* dibidang kelautan dan perikanan
  - c. Pendidikan karakter melalui kegiatan asrama, kesiswaan/ ketrunaan, ekstrakurikuler dan perikanan
  - d. Penyediaan bahan makan bagi peserta didik
  - e. Peningkatan kompetensi lulusan melalui kegiatan sertifikasi, pengembangan minat kewirausahaan dan peningkatan serapan lulusan melalui kerjasama dengan dunia usaha/ dunia industri
  - f. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
  - g. Kelembagaan pendidikan KP
  - h. Perencanaan dan evaluasi pendidikan KP
2. Peningkatan dan penguatan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan
3. Layanan dukungan manajemen satker ( pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan)
4. Layanan perkantoran (Gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor)

---

### 3.5 KERANGKA REGULASI

Sistem perencanaan pembangunan nasional kita selain mengenal kerangka anggaran, juga terdapat kerangka regulasi yang digunakan dalam mempengaruhi kinerja pembangunan nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam Renstra SUPM Sorong Tahun 2020-2024, memerlukan pula kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

### 3.6 KERANGKA KELEMBAGAAN

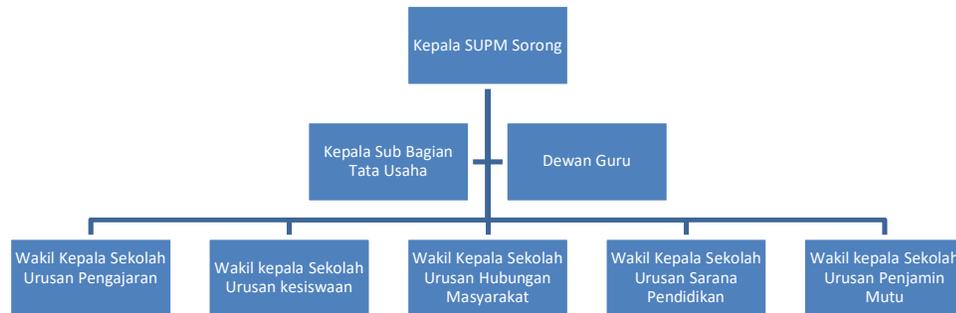
Pencapaian kinerja yang dilakukan SUPM Sorong didukung pula oleh perubahan kelembagaan terkait struktur organisasi SUPM Sorong. Kerangka kelembagaan sendiri (struktur organisasi, ketata laksanaan dan pengelolaan ASN) merupakan perangkat kementerian/ lembaga yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/ lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM nasional.

SUPM Sorong merupakan satuan pendidikan dibawah Pusat Pendidikan KP yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Permen KP Nomor 88 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekolah Usaha Perikanan Menengah, yang memiliki tugas melaksanakan pendidikan menengah kejuaruan dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan perundang-undangan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa dibidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan
- b. Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler
- c. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa
- d. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- e. Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan
- f. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua siswa dan masyarakat; dan
- g. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga

---

Dalam mengoptimalkan pencapaian kinerjanya, SUPM Sorong dilengkapi dengan struktur kelembagaan sebagai berikut:



**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**A. TARGET KINERJA**

**1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pusat Pendidikan KP Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pusat Pendidikan KP disusun mengacu pada Indikator Kinerja BRSDM Tahun 2020-2024. Rincian Indikator Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat melalui kegiatan pendidikan KP	1	Persentase Lulusan yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	75	75	75	75	75
		2	Persentase lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (%)	5	10	15	17	19
		3	Desa mitra pendidikan KP yang meningkat kompetensinya (Desa)	1	1	1	1	1
		4	Lulusan satuan pendidikan KP yang bersertifikat kompetensi (Orang)	2450	2479	2735	2579	2996
		5	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	8171	8308	8668	8843	9068
		6	Sarana dan prasarana pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	21	17	17	17	17
		7	Jejaring dan/atau kerjasama pendidikan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti (dokumen)	22	34	34	34	34
		8	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai	50	55	60	65	75

			peserta didik (%)					
		9	Jumlah lembaga pendidikan terstandar (lembaga)	10	17	17	17	17
		10	Pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya (Orang)	343	350	350	350	350
		11	Pengabdian pendidikan tinggi KP (paket)	17	17	17	17	17
		12	Aparatur KKP yang ditingkatkan jenjang pendidikan formalnya (Orang)	180	180	235	240	250
		13	Dokumen perencanaan kegiatan pendidikan KP yang tersusun sesuai kaidah yang berlaku (dokumen)	50	50	50	50	50
		14	Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP (Nilai)	80	80	80	80	80
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat Pendidikan KP	15	Indeks Profesionalitas ASN Pendidikan KP (indeks)	72	72	72	72	72
		16	Persentase Unit kerja Pendidikan KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	82	82	82	82
		17	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendidikan KP (Nilai)	Baik (88)				
		18	Batas tertinggi Persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pendidikan KP dibanding realisasi anggaran Pendidikan KP TA 2019	1%	1%	1%	1%	1%

		19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pusat Pendidikan KP yang dokumen tidak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60	60	60	60	60
		20	Nilai kinerja anggaran pendidikan KP (Nilai)	85	85	85	85	85

## 1.2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis SUPM Sorong Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja SUPM Sorong disusun mengacu pada Indikator Kinerja BRSDM KP dan Pusat Pendidikan KP. Rincian Indikator Kinerja SUPM Sorong Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kapabilitas dan kompetensi SDM KP meningkat melalui kegiatan pendidikan KP	1	Persentase Lulusan satuan pendidikan KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	75	75	75	75	-
		2	Lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (orang)	17	17	16	12	-
2	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	3	Lulusan satuan pendidikan KP yang bersertifikat kompetensi (Orang)	148	175	158	120	-
		4	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	451	283	120	-	-
		5	Pendidik dan tenaga kependidikan yang	7	7	10	-	7

			meningkat kompetensinya (Orang)					
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat Pendidikan KP	6	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK SUPM Sorong	100	100	≤ 1%	≤ 0,5%	≤ 0,5%
		7	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Sorong (indeks)	73	73	79	79	79
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja SUPM Sorong	80	80	92	92	92
		9	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	84	84	86	92	92
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Sorong (%)	65	65	70	75	75
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) SUPM Sorong	89	89	89	89	89
		12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SUPM Sorong	86	86	82	82	82
		13	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal SUPM Sorong (%)	100	100	100	100	100

## 2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari

---

suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).

Kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di SUPM Sorong merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja lingkup Pusdik KP sebagaimana Lampiran II.

#### 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Kegiatan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Sorong dalam Rancangan Renstra mengusulkan rencana pendanaan melalui APBN Tahun 2020-2024 dan PNBPN Tahun 2020-2024. Anggaran tersebut akan didistribusikan setiap tahunnya untuk membiaya kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan sebagaimana Lampiran III.

---

## PENUTUP

---

Demikian Reviuw Rencana Strategis Tahun 2023 ini kami sampaikan sebagai bahan informasi tentang pelaksanaan program SUPM Sorong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan lulusan yang terdidik dan kompeten, berjiwa wirausaha serta berdaya saing demi kesejahteraan masyarakat Tahun 2020 – 2024. Harapan kami

Kegiatan tersebut dapat terealisasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di SUPM Sorong pada masa mendatang, sehingga sumber daya manusia perikanan yang dihasilkan mampu bersaing baik dalam pemanfaatan kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha di bidang kelautan dan perikanan.

## Lampiran 2.

Rencana Strategis Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong Tahun 2023 Sebagai Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Sekolah Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong Nomor : B. 888/ BRSDM-SUPM.SOR/RC.210/IX/2021 Tentang Rencana Strategis Sekolah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Sorong Tahun 2020 - 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat melalui kegiatan pendidikan KP	1	Persentase Lulusan satuan pendidikan KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	75	75	75	75	-
		2	Lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (orang)	17	17	16	12	-
2	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	3	Lulusan satuan pendidikan KP yang bersertifikat kompetensi (Orang)	148	175	158	120	-
		4	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	451	283	120	-	-
		5	Pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya (Orang)	7	7	10	-	7
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat Pendidikan KP	6	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK SUPM Sorong	100	100	≤ 1%	≤ 0,5%	≤ 0,5%
		7	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Sorong (indeks)	73	73	79	79	79
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja SUPM Sorong	80	80	92	92	92
		9	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	84	84	86	92	92
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk	65	65	70	75	75

			perbaikan kinerja SUPM Sorong (%)					
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) SUPM Sorong	89	89	89	89	89
		12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SUPM Sorong	86	86	82	82	82
		13	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal SUPM Sorong (%)	100	100	100	100	100



Kepala,

Erni Kristina P, A.Pi, M.P  
NIP. 197410302001122002

Lampiran 3.  
 Rencana Strategis Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong  
 Tahun 2023 Sebagai Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala  
 Sekolah Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong  
 Nomor : B. 888/ BRSDM-SUPM.SOR/RC.210/IX/2021 Tentang

MATRIKS KINERJA KERANGKA PENDANAAN SUPM SORONG

PROG/KEG	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Milyar)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan Kelautan dan Perikanan											
	<b>Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten</b>										
	Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (orang)	456	283	120	120	-	5,69	3,79	3,71	1,12	-
Sarana dan Prasarana Pendidikan KP											
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan KP (Unit)	1	1	1	1	1	1,05	-	-	0,16	-
Layanan Dukungan Manajemen Satker											
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker (layanan)	1	1	1	1	1	0,24	1,05	1,05	1,05	1,05
Layanan Perkantoran											
	Jumlah Layanan Perkantoran (layanan)	1	1	1	1	1	9,07	8,86	8,88	9,05	0,48
	Gaji dan Tunjangan (bulan)	12	12	12	12	12	7,02	6,96	6,93	7,05	0,24
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (bulan)	12	12	12	12	12	2,05	1,91	1,95	2,00	0,24



Kepala SUPM Sorong

Erni Kristina P, A.Pi, M.P